

**PERATURAN DESA SERUT**

DESA : SERUT

KECAMATAN : NGUTER

KABUPATEN : SUKOHARJO

NOMOR : 6

TAHUN : 2020



**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)**

**TAHUN 2021**

DILAPORKAN KEPADA : BUPATI SUKOHARJO LEWAT CAMAT NGUTER

TANGGAL :

NOMOR SURAT :



**SALINAN**

KEPALA DESA SERUT

KECAMATAN NGUTER

KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SERUT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur bahwa RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

 b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kedua yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Serut Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
17. Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT

dan

KEPALA DESA SERUT

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Tahun 2021 memuat:

1. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2020;
2. rancangan kerangka ekonomi;
3. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
4. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2021 berfungsi sebagai :

1. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2021; dan
2. pedoman dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2021 dibebankan pada APB Desa Serut Tahun anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Serut

Ditetapkan di Serut

pada tanggal 30 September 2020

KEPALA DESA SERUT,

Ttd

SUBARI

Diundangkan di Serut

pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DESA SERUT,

Ttd

SUYATNO

LEMBARAN DESA SERUT TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN I

PERATURAN DESA SERUT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT TAHUN 2021

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

1. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
2. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
3. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
4. Kemampuan dan keberdayaan masyaralcat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139), adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan

pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

* 1. **DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);
	1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
20. **Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

 Rencana Kerja Pembangunan Desa Serut sebagai dokumen perencanaan pembangunan desa kurun waktu 1(satu) tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen desa ( Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha ) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalm pola sikap dan satu pola tindak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Serut diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan – permasalahan pembangunan spesifik Desa Serut sebagai Desa Agraris dalam dimensi waktu 1 (satu) tahun serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

 Dengan adanya RKP Desa diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi anatara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dalam mampu mengoptimalkan partisipasi.

1. **Tujuan**

Tujuan disusunnya RKP Desa antara lain :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa;
2. Memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program – program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat prioritas aspirasi masyarakat;
3. Memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan ditahun-tahun yang berjalan;
4. Menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan;
5. Diharapkan dengan adanya RKP Desa pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada kepentingan politik dan kekuatan golongan.
	1. **PROSES PENYUSUNAN**
6. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
7. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
8. Mencermati pagu indikatif desa;
9. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
10. Mencermati dokumen RPJM Desa;
11. Penyusunan rancangan RKP Desa;
12. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
13. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
15. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
16. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peratuan Desa tentang RKP Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa.
	1. **SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa**

Sistematika penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa Serut Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
	2. Dasar Hukum
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Proses Penyusunan
	5. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

* 1. Gambaran Umum Kondisi Desa
	2. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

* 1. Potensi
	2. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

* 1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021.
	2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021

BAB V. PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA**

**SERUT TAHUN 2021**

**2.1. KONDISI DESA**

**2.1.1. Sejarah Desa**

Segala sesuatu yang ada di dunia ini karena ada yang membuat atau yang menciptakan, begitu juga nama sebuah desa tersebut,bila desa-desa lain tidak lepas dari sejarah.begitu juga dengan Desa Serut walaupun keberadannya belum dapat dipertanggungjawabkan secara definisi atau ilmiah namun di kalangan masyarakat Desa Serut ada sebuah sejarah.

 Pada zaman Raja kerajaan Surakarta Hadiningrat, yang hendak menuju Keraton Surakarta, sebelum sampai tujuan Sang raja beristirahat di suatu dukuh yang belum ada namanya, maka setelah sang raja melanjutkan perjalanan dan seorang tokoh memberi nama Desa Serut karena disekitarnya banyak Pohon Serut.

Pada tanggal 16 Juni 1939 Sampai dengan 23 Desember 1940 masyarakat mempercayakan untuk menjabat sebagai Kepala desa oleh Soetodimeedjo,Sedangkan pada tahun 1941 diadakan pemilihan kepala desa tapi tidak ada yang mencalonkan sehingga masyarakat mengadakan atau memutuskan mengadakan kumpulan Desa pada hari Sabtu Legi Tanggal 10 Mei 1941 dan menghasilkan mufakat menentukan pada bapak Soekopanitro yang di percaya untuk menjabat sebagai kepala Desa Serut Dan di bantu Oleh kamituo. Kebayan Banaran Oleh Topawiro, Kebayan Jumok Oleh Sukat, Kebayan Gadingan Pawiro semito, Kebayan Kepuh Dampit Cokro Rejo, Mudin Serut Iman Katam serta carik Kartomijo, sampai dengan tahun 1946, yang selanjutnya pada tahun 1947 Kepala Desa Digantikan oleh Yoso Miharjountuk menjadiLurah Desa Serut dengan Carik Desa Wiro Mulyono sampai dengan Tahun 1964. Pada tahun 1964 kedadan negara baru ada masalah maka kepala Desa ditunjuk oleh wedono Dipegang Pj.Tamarmin menjabat Kepala Desa Sampai1981 kemudian Desa Serut terus berkembang dengan sebagai berikut :

1. Tahun ( 1981-1989)

Kepala Desa : Sulardi

Sekdes : Marji Hartono

1. Tahun ( 1989-1998 )

Kepala Desa : Sukimin

Sekdes : Marji Hartono

1. Tahun ( 1998-2006 )

Kepala Desa : Tukino

Sekdes : Marji Hartono

1. Akir tahun 2006 Marji Hartono ( Pj. Kepala Desa )
2. Tahun ( 2006-2012 )

Kepala Desa : Sukimin

Sekdes : Marji Hartono

1. Tanggal Juni 2012 Wagino S.Sos Sebagai Pj.Kepala Desa
2. Tahun ( 2013-2018 )

Kepala Desa : Subari

Sekdes : Wagino S.Sos

1. Tahun ( 2018-2024 )

Kepala Desa : Subari

Sekdes : Suyatno

**2.1.2. DEMOGRAFI**

1. Batas Wilayah Desa

 Letak geografi Desa Serut , terletak diantara :

 Sebelah Utara : Desa Juron

 Sebelah selatan : Desa Janglengan

 Sebelah Barat : Desa Celep

 Sebelah Timur : Desa Wonokerto Kab.Wonogiri

1. Luas Wilayah Desa : 389.5987 ha
2. Pemukiman : 134.9000 ha
3. Pertanian Sawah : 171.0126 ha
4. Ladang/Tegalan : 69.0126 m²
5. Hutan : - ha
6. Rawa-rawa : - ha
7. Perkantoran : 0,25 m²
8. Sekolah : 0,75 m²
9. Jalan : 14.6735 Km
10. Lapangan sepak bola: 0,7 ha
11. Orbitasi
12. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 8 KM
13. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
14. Jarak ke ibu kota kabupetan : 20 KM
15. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 30 Menit
16. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1116 KK

2. Laki-laki : 1761 Orang

3. Perempuan : 1720 Orang

4. Jumlah Penduduk: 3481 Orang

**2.1.3. KEADAAN SOSIAL**

* + - * 1. Pendidikan

1. SD/ MI : 289 Orang

2. SLTP/ MTs : 671 Orang

3. SLTA/ MA : 736 Orang

4. S1/ Diploma : 319 Orang

5. Putus Sekolah : 246 Orang

6. Buta Huruf : 1220 Orang

* + - * 1. Lembaga Pendidikan

 1. Gedung TK/PAUD : 3 buah/ Lokasi di Dusun Kepuh Dampit, Dusun Jumok dan Dusun Gadingan

 2. SD/MI : 2 buah/ Lokasi di Dusun Sendangrejo (Komplek SD)

 3. SLTP/MTs : -

 4. SLTA/MA : -

 5. Lain-lain : Polindes 1 buah/ Lokasi di Dusun Sendangrejo

* + - * 1. Kesehatan
	1. Kematian Bayi

a. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 1 orang

b. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : - orang

1. Kematian Ibu Melahirkan

a. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 1 Orang

b. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : - Orang

1. Cakupan Imunisasi

a. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang

b. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang

c. Cakupan Imunisasi Cacar : -. orang

1. Gizi Balita

a. Jumlah Balita : 467 orang

b. Balita gizi buruk : - orang

c. Balita gizi baik : 467 orang

d. Balita gizi kurang : - orang

1. Pemenuhan Air Bersih

a. Pengguna sumur galian : 1116 KK

b. Pengguna air PAH : 205 KK

c. Pengguna Sumur Pompa : .- KK

d. Pengguna sumur hidran umum : - KK

e. Pengguna air sungai : - KK

* + - * 1. Keagamaan.

# Data Keagamaan Desa Serut Tahun 2019

Jumlah Pemeluk :

* + - Islam : 3459 orang
		- Katolik : - orang
		- Kristen : 12 orang
		- Hindu : - orang
		- Budha : - orang
		- Aliran Kepercayaan Lainnya : .. orang

# Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

* + - Masjid/ Musholla : 11 buah/ 1 buah
		- Gereja : 1 buah
		- Pura : - buah
		- Vihara : - buah

**2.1.4 KEADAAN EKONOMI**

* + - 1. Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah : 65 ha

2. Padi Ladang : 106 ha

3. Jagung : 9 ha

4. Palawija : 10 ha

5. Tembakau : - ha

6. Tebu : 10 ha

7. Kakao/ Coklat : - ha

8. Sawit : - ha

9. Karet : - ha

10. Kelapa : 0,25 ha

11. Kopi : - ha

12. Singkong : 3 ha

13. Lain-lain : 2 ha

* + - 1. Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing : 300 Rumah Tangga / 511 ekor

2. Sapi : 195 .ekor

3. Kerbau : - Rumah Tangga / - ekor

3. Ayam : 500 Rumah Tangga / 2325 ekor

4. Itik : 20 Rumah Tangga / 60 ekor

5. Burung : 100 ekor

6. Lain-lain : - .ekor

* + - 1. Perikanan

1. Tambak ikan : - ha

2. Tambak udang : - ha

3. Lain-lain ;

 Kolam Ikan Lele : 10 Kolam/ 120 m²

* + - 1. Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani : 605 orang

2. Pedagang : 964 orang

3. PNS : 18 orang

4. Tukang : 234 orang

5. Guru : 6 orang

6. Bidan/ Perawat : 2 orang

7. TNI/ Polri : 10 orang

8. Pesiunan : 5 orang

9. Sopir/ Angkutan : 15 orang

10. Buruh : 225 orang

11. Jasa persewaan : 4 orang

12. Swasta : 936 orang

**2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA**

1. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa :

1. Kepala Desa : 1 orang

2. Sekretaris Desa : 1 orang

3. Perangkat Desa : 9 orang

4. BPD : 9 orang

1. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :

1. LPMD : 1 Lembaga

2. PKK : 1 Lembaga

3. Posyandu : 5 Lembaga

4. Pengajian : 10 Kelompok

5. Arisan : 21 Kelompok

6. Simpan Pinjam : 20 Kelompok

7. Kelompok Tani : 5 Kelompok

8. Gapoktan : 1 Kelompok

9. Karang Taruna : 11 Kelompok

10. Irma/ Irmus : 10 Kelompok

11. Ormas/ LSM : 1 Kelompok

12. Lain-lain : - Kelompok

1. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

1. Dusun 01 Serut : Jumlah 6 RT 2 RW

2. Dusun 02 Gadingan : Jumlah 5 RT 2 RW

3. Dusun 03 Malangsari : Jumlah 6 RT 2 RW

4. Dusun 04 Jumok : Jumlah 4 RT 2 RW

1. Struktur Organisasi Desa

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SERUT**

KEPALA DESA

SEKRETARIS DESA

KEPALA URUSAN PERENCANAAN

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KEPALA URUSAN DAN TATA USAHA UMUM

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

Keterangan:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ : garis komando

 : garis koordinasi

**SUSUNAN ORGANISASI**

**PEMERINTAHAN DESA SERUT**

**KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO**

* + - * 1. NAMA – NAMA APARAT PEMERINTAH DESA :

Kepala Desa : SUBARI

Sekretaris Desa : SUYATNO

Kepala Seksi Pemerintahan : TARNO

Kepala Seksi Kesejahteraan : GITO

Kepala Seksi Pelayanan : GITO

Kaur Umum : SARNO MURDIYONO

Kaur Perencanaan : ADITIYA EKO PRASETYO

Kaur Keuangan : SUTARMI

Kepala Dusun (Kadus) :

1. Kadus 01 : MIYASTO
2. Kadus 02 : SUWANDI
3. Kadus 03 : MARSUDI
4. Kadus 04 : ANDRIYATNO
	* + - 1. NAMA – NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua : AGUS WARSINO

Wakil Ketua : WIDI MURJITO

Sekretaris : SUHARTATIK Spd

Angota : SUPARMIN

Angota : WIDODO

Angota : PARDI

Angota : YANTO

Angota : JUMALI

Angota : TUKIRAN

**BAB III**

**POTENSI DAN MASALAH**

* 1. Daftar Potensi dan Masalah Dari sketsa Desa;

Daftar masalah dari potret desa bersumber dari hasil pengkajian desa yang mencerminkan daftar masalah kondisi prasarana; lingkungan; kesehatan; pendidikan; sosial-budaya; keamanan dan sumberdaya perekonomian yang ada di desa.

Daftar potensi dari sketsa desa merupakan rincian peluang atau kondisi lain yang bisa dioptimalkan dari gambaran masalah yang ada di desa yang bisa merubah keadaan setempat menjadi lebih baik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **POTENSI** | **MASALAH**  |
| **Sarana/Prasarana Pembangunan** |
| 1 | 1. SDMasyarakat | Sulitnya membawa hasil panen para petani karena Jalan pertanian masih bentuk tanah  |
| 2. Pasir |
| 3. Batu |
| 2 | 1. SDMasyarakat | Sebagian Jalan Desa Rusak menyulitkan warga dalam beraktivitas |
| 2. Pasir  |
| 3. Batu |
| 3 | 1. Murid | Proses belajar Belum maksimal karena masih kurangnya sarana prasarana PAUD |
| 2. Guru  |
| 3. SDMasyarakat |
| 4 | 1. SDMasyarakat  | Sebagian Tanah Milik Desa belum dikelola/ dimanfaatkan dengan baik  |
| 2. Pasir  |
| 3. Bambu |
| 5 | 1. SDMasyarakat | Tanah Pemakaman Umum sering longsor belum ada penahan longsor /talud  |
| 2. Pasir |
| 3. Bambu |
| 6 | 1. SDMasyarakat | Belum adanya jalan dan jembatan penghubung di wilayah Dusun serut dan gadingan |
| 2. Pasir |
| 3. Batu |
| 7 | 1. Cangkul | Jika terjadi hujan, air hujan tergenang dan sering masuk kerumah penduduk |
| 2. Gotong royong  |
| 3. Bambu  |
| 4. Pasir |
| 8 | 1. SDMasyarakat  | Belum adanya sisitem pengairan sawah/ bendungan tersier  |
| 2. Pasir |
| 3. Bambu  |
| 4. Kayu |
| 9 | 1. SDMasyarakat | Belum adanya jembatan penghubung antar Dusun (sendangrejo dan gadingan.) |
| 2. Pasir  |
| 3. Batu |
| 10 | 1. Swadaya  | Masih banyaknya sengketa batas tanah perlu adanya sertfikat masal |
| 2. Patok kayu |
| 11 | 1. SDMasyarakat | Gapura batas desa dan dusun tidak ada sehingga warga kesulitan untuk memberikan informasi |
| 2. Pasir  |
| 3. Batu |
| 12 | 1. SDMasyarakat | Jembatan penghubung antar desa sempit perlu pelebaran |
| 2. Pasir  |
| 3. Batu |
| 13 | 1. Gotong royong  | Pembangunan, Pemeliharaan tempat ibadah masih kurang sumber dana |
| 2. Swadaya |
| 14 | 1. SDMasyarakat | Warga sering buang sampah sembarangan perlu adanya tempat sampah |
| 2. Pasir  |
| 3. Bata |
| 4. Gotong Royong |
| 15 | 1. pasir, batu | Tidak adanya gardu/pos jaga sehingga warga kesulitan dalam pos kamling |
| 2. Swadaya |
| 16 | 1. SDMasyarakat | Jalan Desa pengaspalanya sudah lama perlu perbaikan |
| 2. Pasir, Batu |
| 17  | 1. Pasir,  | Kurangnya SPAL di masing-masing wilayah RT sehingga Banyak warga buang limbah smbarangan  |
| 2. Batu,  |
| 3. Gotong royong  |
| 18 | 1. Pasir,  | Akses jalan pertanian terganggu karena tidak adanya jembatan penghubung/ jalan masih tanah  |
| 2. Batu,  |
| 3. Gotong royong |
| 19 | 1. Swadaya  | Masih banyak rumah warga yang tidak layah huni |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 20 | 1. Swadaya  | Sistem Drainase tidak berfungsi baik, masih terjadi mempet |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 21 | 1. Swadaya  | Tempat POSYANDU masih numpang di rumah Kadus/ warga  |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 22 | 1. Gotong Royong  | .................. Kanak-Kanak (TK) Pertiwi kurang memadai sehingga proses belajar kurang maksimal |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 23 | 1. Gotong Royong  | Pertemuan tingkat Dusun masih dirumah Kadus ruangan pertemuan tak mencukupi |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 24 | 1. Gotong Royong  | Sarana olah raga kurang perawatan Lapangan sepak bola sering becek  |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 25 | 1. Gotong Royong  | Minimnya seragam dan alat olahraga sehingga tidak maksimal dalam kegiatan olahraga |
| 2. Pemuda |
| 26 | 1. Gotong Royong  | Jembatan kali/ sungai di RT 02/09 rusak, sehingga mengganggu aktivitas warga |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
|   |
| 27 | 1. Gotong Royong  | Di Dusun Banaran terdapat jalan masih bentuk tanah dan Rusak mengganggu aktivitas warga  |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 28 | 1. Gotong Royong  | Saluran pembuangan air Drainase di Dusun 03 rusak perlu adanya perbaikan |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 29 | 1. Gotong Royong  | Diwilayah Dusun masih terdapat rumah yang tidak layak huni  |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 30 | 1. Gotong Royong  | Minimnya saluran air di RT 03/06 sehinga pembuangan air limbah tidak maksimal |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 31 | 1. Gotong Royong  | Tidak adanya Jalan/ Jembatan penghubung antara Dusun 01 dan 02n perlu pembangunan jalan/ jembatan |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
|   |
| 32 | 1. Gotong Royong  | Masih minimnya keberadaan gorong-gorong hampir disetiap wilayah Dusun  |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| 33 | 1. Gotong Royong  | Tidak adanya gorong-gorong di RT 03 RW 06 mengakibatkan saluran air mampet |
| 2. Batu  |
| 3. Pasir |
| **Pendidikan** |
| 76 | 1. Murid  | Terjadinya ketimpangan jumlah siswa di SD Negeri di Desa Serut, diakibatkan karena kondisi SD yang dinilai kurang representativ baik dari segi SDM gurunya maupun bangunannya |
| 2. Gedung  |
| 3. Guru  |
| 4. Wali murid |
| 77 | 1. Murid  | Terbatasnya swadaya masyarakat guna opersional TK dan PAUD |
| 2. Gedung  |
| 3. Guru  |
| 4. Wali murid |
| 78 | 1. Murid, Walimurid  | Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional Madrasah di Dusun Batan |
| 2. Guru, Gedung  |
| 79 | 1. Murid, Walimurid  | Perlu adanya rehab Gedung Madrasah di Dusun Batan |
| 2. Guru, Gedung  |
| 79 | 1. Murid, Walimurid  | Terbatasnya swadaya masyarakat guna operasional TPQ |
| 2. Guru, Gedung  |
| 80 | 1. Murid  | Perlu adanya perhatian bagi TPQ yang memenuhi kualifikasi agar pengajarnya dapat konsisten (Pemberian Bisyaroh/ tunjangan). |
| 2. Gedung  |
| 3. Guru  |
| 4. Wali murid |
| 5. Lembaga Keagamaan (LAZIS) |
| 80 | 1. Murid, Walimurid  | Kurangnya permainan untuk anak didik PAUD dan TK Desa Serut |
| 2. Guru, Gedung  |
| 81 | 1. Murid, Walimurid | Proses belajar Kegiatan TPQ tidak lancar prasarana kurang memadahi |
| 2. Guru, Gedung |
|   |
|   |   |
| 82 | 1. Murid, Walimurid  | Kegiatan belajar madrasah kurang maksimal bangunan/ mebeler rusak |
| 2. Guru, Gedung  |
| 83 | 1. Murid, Walimurid  | Perlu penambahan lokal TPQ Al Hidayah di Dusun Watgalih Utara, santrinya terus bertambah |
| 2. Guru, Gedung  |
| **Kesehatan** |
| 84 | 1.  Warga  | Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat |
| 2.  Bidan Desa  |
| 3.  Gedung PKD |
| 85 | 1.  Murid  | Masih adanya Warga miskin yang kurang mengkonsumsi makanan bergizi |
| 2.  Gedung  |
| 3.  Guru  |
| 86 | 1.  Warga  | Belum maksimalnya pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat desa Serut |
| 2.  Bidan Desa  |
| 3.  Gedung PKD |
| 87 | 1.  Murid  | Masih belum terpenuhinya makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi anak sekolah |
| 2.  Gedung  |
| 3.  Guru  |
| 88 | 1.  Warga  | Masih adanya warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan untuk berobat |
| 2.  Bidan Desa  |
| 3.  Gedung PKD |
| 89 | 1. Pasir,  | kesadaran warga diperlukan, karena masih ada yang BAB disungai  |
| 2. Batu,  |
| 3. Gotong royong |
|   |
| **Pemberdayaan** |
| 90 | 1.  Penyuluh  | Minimnya modal usaha yang dimiliki para pedagang kecil untuk khusus perempuan |
| 2.  Warga  |
| 3.  Gedung |
| 91 | 1. Pasir | Tempat ibadah di masing-masing Dusun perlu perawatan  |
| 2. Batubata  |
| 3. Tenaga Swadaya |
| 92 | 1.  Penyuluh  | Masih minim dan rendahnya ketrampilan/ sumber daya manusia yang dimilki warga |
| 2.  Warga  |
| 3.  Gedung |
| 93 | 1.  Penyuluh  | Pencemaran dan perusakan lingkungan masih sering terjadi,  |
| 2.  Warga  |
| 3.  Gedung |
| 94 | 1.  Penyuluh  | Peningkatan Kesetaraan jender dalam program pembanguna belum terlaksana |
| 2.  Warga  |
| 3.  Gedung |
| 95 | 1.   Lembaga Desa | Belum bisa dimanfaatkannya Tanah Milik Desa sebagai modal utama mendirikan Badan Usaha  |
| 2.   Pengurus |
| 3.   Program |
| 4.   Modal Usaha |
| 5.   Tanah Desa |

* 1. Daftar Potensi dan Masalah Dari Kalender Musim;

Daftar masalah dari kalender musim merupakan daftar gambaran dari hasil pengkajian dari kondisi musim di desa setempat yang menjelaskan situasi/keadaan pada masing-masing musim tertentu (musim kemarau; musim pancaroba; dan musim hujan).

Daftar potensi dari kalender musim merupakan daftar sumberdaya alam/material yang bisa dioptimalkan untuk mendukung perbaikan masalah (sosial; ekonomi; lingkungan; dll) yang ditimbulkan oleh faktor musim.

* 1. Daftar Potensi dan Masalah Dari Bagan Kelembagaan.

Daftar masalah dari bagan kelembagaan merupakan daftar masalah yang menjadi temuan dari hasil pengkajian atas kondisi kelembagaan yang ada di desa, seperti pada pemerintah desa; BPD; RT; Kelompok Tani; kelembagaan simpan pinjam; ; dll.

Daftar potensi dari bagan kelembagaan adalah daftar potensi yang bisa dikembangkan dari kondisi/keadaan yang ada dari masing-masing kelembagaan yang ada di desa tersebut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | MASALAH | POTENSI |
| 1 | Terbatasnya alat kerja yang dimiliki pemerintah desa Serut sehingga Pelayanan kurang optimal | 1. Polindes2. Bidan desa |
| 2 | Tidak adanya tempat parkir di area balai desa Serut yag representatif | Perangkat lengkap  |
| 3 | Kegiatan kesenian di desa Serut kurang regenerasi Dan Belum Berjalan | 1. Pemuda 2. Swadaya 3. alat |
| 4 | Kegiatan Lembaga-lembaga desa belum berjalan baik | Ada pengurus dan anggota |
| 5 | Tidak adanya honor bagi Pengurus PKK sehingga tidak optimal | Ada pengurus dan anggota |
| 6 | Kondisi Balai Desa Serut sebagian bangunan atapnya bocor Dan Masih Perlu Pembangunan Parkir Dan Mosolha  | 1. Pasir2. Batu3. Gotong royong |
| 7 | Bangunan Balai Desa masih belum rapi | 1. Pasir2. Batu3. Gotong royong |
| 8 | Usia bangunan Aula Balai Desa sudah cukup tua, perlu rehab dan pemeliharaan | 1. Pasir2. Batu3. Gotong royong |
| 9 | Karang taruna desa Serut belum bisa bekerja sama dengan pemdes dengan baik  | 1. Pengurus
2. Gedung
3. Swadaya
 |
| 10 | Administrasi pemerintah desa masih belum tertata rapi | 1. Gedung 2. Pemdes  |
| 11 | Disaat Musdus tidak punya tempat yang memadai | 1. Swadaya2. Batu3. Gotong-royong4. Pasir |
| 12 | Pemerintah desa kesulitan dalam menangani masalah sosial | 1. Pemdes 2. Lembaga Desa 3. warga |
| 13 | Fungsi LPMD masih berjalan kurang optimal | 1. Pengurus2. Pemdes |
| 14 | Fasilitas pemerintah desa masih banyak keterbatasan | 1. Gedung2. Swadaya |
| 15 | Hubungan BPD dengan masyarakat masih kurang optimal | 1. Lembaga Desa 2. Pemdes |
| 16 | Bangunan PKD Desa Serut Masih perlu Pembenahan aktifitas pelayanan kurang maksimal | 1. Batu2. Pasir3. Swadaya |
| 17 | Program kerja Gapoktan tidak berjalan baik | 1. Gapoktan
2. Kelompok Tani
 |
| 18 | Tidak adanya anggaran untuk ketua RT sehigga kegiatan diwilayah RT tidak berjalan | 1. Lembaga Desa 2. Pemdes |

**BAB IV**

**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

1. **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**
	* 1. **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**
2. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
3. Operasional Pemerintah Desa
4. Operasional BPD
5. Pengisian Perangkat Desa
6. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7. Pengelolaan Sistem Informasi Desa
8. Penyertipikatan Tanah Kas Desa
9. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
10. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
11. Penyusunan dan Pembuatan Monografi
12. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
15. Operasional RT/RW
16. Pembayaran PBB
17. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
	* 1. **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**
18. Pembangunan Saluran Irigasi
19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
20. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
21. Rehap Jalan Beton
22. Rehap Saluran Air
23. Perbaikan dan Pembangunan Pagar Makam
24. Pembangunan Tempat Ibadah
25. Pembangunan Gedung Serba Guna
26. Pembangunan Jamban/RTLH
27. Pembangunan dan Pemeliharaan Talud
28. Rehab Jalan Desa
29. Pembangunan Gudang
30. Pembangunan Jaringan Air Bersih
	* 1. **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
31. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban
32. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga
33. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
34. Pendidikan Anak Usia Dini
35. Penguatan Linmas dan Kader Siaga Trantib
36. Pemantauan Bayi Gizi Buruk
37. Pemantauan Ibu Hamil
38. Operasional Sarana dan Prasarana Ibadah
	* 1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
39. Pengadaan Inventaris Kelompok Masyarakat
40. Peningkatan Kapasistas Lembaga Masyarakat
41. Pemberdayaan Posyandu,UP2K dan BKB
42. Operasional Pokjanal
43. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
44. Pelatihan Seni Budaya
45. Pemberantasan Sarang Nyamuk
46. Pengadaan Peralatan PKD
47. Operasinal KPMD
	* 1. **Bidang Belanja Tak Terduga**

 Penanggulangan Bencana Alam

1. **PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021**
	* 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
		2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
		3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
		4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		5. Bidang Tak Terduga
2. **PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG/SEKTOR**
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 957.225.000
4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp. 1.053.731.000
5. Bidang Pembinaan Kemasyaratan Rp. 757.716.000
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 178.000.000
7. Bidang Tak Terduga Rp. 30.000.000
8. Total pagu indikatif adalah **Rp. 2.976.673.000**

**BAB V**

**PENUTUP**

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2019–2025. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa ( SKPD ), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Serut secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

RKP Desa tahun 2021 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2021. Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;

Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;

* + - 1. Keberpihakan kepada masyarakat;
			2. Peran serta aktif masyrakat;

Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

* Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Serut tahun 2019–2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2019 dengan penuh tanggung jawab;
* Forum musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
* Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Desa tahun 2019 – 2025 dan RKP Desa tahun 2021.

 KEPALA DESA SERUT,

 Ttd

 SUBARI

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA SERUT KECAMATAN NGUTER**

**KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 7 TAHUN 2020**

**TENTANG**

 **KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2021**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERUT,**

**Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

1. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Serut Tahun 2021;
3. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang RKP-Desa Tahun 2021;
4. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

1. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Muswarah Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
4. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45)

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menetapkan**  | **:** |  |
| KESATU | : | Membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. |
| KEDUA  | : | Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. |
| KETIGA | : | Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Disepakati di Serut Pada Tanggal 29 September 2020 |
|  | **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)****DESA SERUT**KETUA Ttd**AGUS WARSENO** |

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 141 /7 / IX / 2020

Nomor : 144 / BPD - Desa Serut / 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA SERUT

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2021

 Pada hari ini Selasa Tanggal 29 bulan September tahun Dua ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUBARI : Kepala Desa Serut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AGUS WARSENO : Ketua BPD Desa Serut dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Serut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Serut dengan Kepala Desa Serut sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Serut Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Serut Tahun 2021 kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan klarifikasi.
2. PIHAK PERTAMA melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Serut Tahun 2021 untuk dilakukan pengundangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA****Ttd****SUBARI** | **PIHAK KEDUA****Ttd****AGUS WARSENO** |

**BERITA ACARA**

**PENYUSUNAN RKP-DESA**

**MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP-Desa di Desa Serut, Kecamatan Nguter., Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 September 2020

Jam : 10.00 wib s/d Selesai

Tempat : Pendopo Kantor Desa Serut

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

1. Materi

Pencermatan RPJM-Desa 2019 – 2025 untuk dijabarkan di dalam RKP-Desa 2021.

Kriteria dan verifikasi RKPDes 2021 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa

3. Rancangan RKP Desa Tahun 2021

4. Proposal Teknis Kegiatan

5. Gambar Rencana Prasarana

6. Rencana Anggaran Biaya

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB

8. Dafar Usulan RKP Desa

1. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : SUBARI dari Kepala Desa

Notulen : SUYATNO dari Sekdes

Narasumber :1. SUBARI dari Kepala Desa

 2. AGUS WARSENO dari Ketua BPD

 3. SUTIYONO dan Ketua LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP-Desa.

1. Pagu Indikatif Desa;

2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa;

3. Rancangan RKP-Desa Tahun 2021;

4. Proposal Teknis Kegiatan;

5. Gambar Rencana Prasarana;

6. Rencana Anggaran Biaya;

7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB;

8. Dafar Usulan RKP-Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 September 2020

KEPALA DESA SERUT,

Ttd

**SUBARI**

WAKIL MASYARAKAT :

 Nama Alamat Tanda tangan

1. SUTIYONO Kepuh Dampit RT 2/ RW 5 ........................
2. Kuntari Serut RT 1 / RW 2 ........................
3. AGUS WARSINO Serut RT 2 / RW 2 ........................
4. Giyem Kepuh Dampit RT 2/ RW 5 ........................
5. Narsi Jumok RT 1/ RW 8 ........................

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA**

**PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKP-Desa 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta undangan lainnya dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati RKP-Desa 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :

a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan.

b. Operasional Perkantoran.

c. Operasional BPD.

d. Operasional RT/RW.

1. Bidang Pembangunan
	1. Perbaikan Saluran Irigasi
	2. Pengaspalan Jalan Desa
	3. Pembangunan Rabat Beton.
	4. Pembangunan Talud Jalan.
	5. Pe,bangunan Gorong – gorong.
	6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
	7. Pembangunan Sarana dan Prasaran Pendidikan.
	8. Pembangunan Sarana dan Prasarana olah raga.
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
	2. Pembinaan Kelompok Kesenian.
	3. Pembinaan Keagamaan.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
	1. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
	2. Kegiatan PKK.
	3. Kegiatan LPM.
	4. Kegiatan Karang Taruna.
	5. Pelatihan Kewirausahaan.
	6. BUMDes
	7. Pengadaan Inventaris di tingkat RT.
4. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
5. Penanggulangan bencana
6. Keadaan darurat
7. Keadaan Mendesak
8. Menyepakati RKP-Desa 2021 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP-Desa 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
9. Program / usulan di RPJM-Desa yang belum terealisai agar dimasukkan dalam RKP-Desa 2021.
10. Dalam memasukkan usulan di RKP-Desa 2021 lebih difokuskan pada tingkat wilayah RT.
11. Semua hasil penggalian gagasan agar diupayakan bisa diakomodasi dalam RKP-Desa 2021.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA SERUT**

1. Ketua / Anggota : AGUS WARSENO (……………………)
2. Wakil Ketua/Anggota : WIDI MURJIANTO (……………………)
3. Sekretaris / Anggota : SUHARTATIK (……………………)
4. Anggota : TUKIRAN (……………………)
5. Anggota : YANTO (……………………)
6. Anggota : SUPARMIN (……………………)
7. Anggota : PARDI (……………………)
8. Anggota : WIDODO (……………………)
9. Anggota : JAMALI (……………………)

**DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA**

ACARA : PEMBAHASAN RKP Desa 2021

DESA : SERUT

KECAMATAN : NGUTER

TANGGAL : 29 September 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |
|  |  |  | …………………… |

 |

BPD Desa SERUT

Sekretaris,

 Ttd

( SUHARTATIK )

|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**KECAMATAN NGUTER****DESA SERUT**Alamat : Jl. Songgorungi – Jatipuro KM. 8 Desa Serut Kode Pos 57571 |

KEPUTUSAN KEPALA DESA SERUT KECAMATAN NGUTER

Nomor : 141 / ……. /………… /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa) TAHUN 2021

KEPALA DESA SERUT,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa;

 b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa);

Mengingat **:** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
13. Peraturan Desa Serut Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Serut (Lembaran Desa Serut Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Desa Serut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Serut Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

KESATU : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2021 sebagai berikut :

Pembinaf : 1. SUBARI (Kepala Desa)

Ketua : 2. SUYATNO (Sekretaris Desa)

Sekretaris : 3. SUTIYONO (Ketua LPM)

Anggota : 4. ADITIYA EKO P (Perangkat Desa)

 5. BAMBANG W (KPMD)

 6. GIYEM (UNSUR PEREMPUAN)

 7. KUNTARI (UNSUR PEREMPUAN)

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP-Desa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2021 berdasarkan data – data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP-Desa mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Permendagri Nomor 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri Nomor 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans Nomor 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans Noomor 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans Nomor 5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKP-Desa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP-Desa tahun 2021 oleh Kepala Desa.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa Serut ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

 Ditetapkan di Serut

Pada Tanggal 29 September 2020

 KEPALA DESA SERUT

 Ttd

 **SUBARI**